

SNAP_2022_FULL PAPER_19

SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA PENATAUSAHAAN TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT DI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Oggy Aldhian Yuristantyo
Perbanas Institute
Email: oggy.aldhian07@perbanas.id

Adele Mailangkay
Perbanas Institute
Email: adele@perbanas.id

***Abstrak** – Sistem Informasi berbasis web pada penatausahaan tuntutan hukum kepada pemerintah pusat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merupakan suatu sistem yang memudahkan Kementerian / Lembaga, Administrator, dan Auditor dalam melakukan penatausahaan sebuah tuntutan hukum. Dikarenakan sistem yang dibuat berbasis web, sehingga sistem akan dapat diakses darimana saja dan kapan saja. Pada sistem ini menu yang ada hanya dapat diakses oleh user tertentu yaitu Administrator, Kementerian / Lembaga, dan Auditor. Dalam membangun sistem ini digunakan alat bantu pengembangan sistem yaitu Data Flow Diagram (DFD), Context Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD) dan Flowchart serta dengan menggunakan bahasa pemrograman Javascript dan HTML dan Oracle sebagai databasenya.*

Kata kunci: sistem, informasi, tuntutan, hukum

I. PENDAHULUAN

Informasi adalah salah satu kata kunci salah satu kunci pada zaman ini. Untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi, komputer dan teknologinya adalah salah satu alat bantu yang paling tepat. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan antara lain untuk media pembelajaran menggunakan komputer termasuk e-learning, alat bantu pengolahan

data akademik, dan media penyampaian informasi.

Tuntutan kebutuhan akan informasi dan penggunaan komputer yang semakin banyak mendorong terbentuknya sebuah jaringan komputer yang mampu melayani berbagai kebutuhan. dengan adanya jaringan komputer, pengelolaan informasi dapat berlangsung lebih baik lagi. Berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasi menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang harus dan yang bisa diolah, sehingga kebutuhan penggunaan jaringan komputer semakin diperlukan.

Saat ini penatausahaan tuntutan hukum kepada pemerintah pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) masih dilakukan secara manual menggunakan excel. Penatausahaan yang dilakukan secara manual tersebut mempunyai beberapa kelemahan diantaranya belum bisa dilakukan sinkronisasi secara *real-time*, rawan terjadinya duplikasi pencatatan karena petugas yang melakukan penatausahaan berbeda-beda, selain itu juga dimungkinkan akan terjadi serangan virus terhadap file excel tersebut.

II. METODE

Metode pengembangan yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak adalah model atau paradigma klasik yang sering disebut

waterfall. Model ini sangat terstruktur dan bersifat linier.

Metode ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan sekuensial di dalam sistem perangkat lunaknya. Pengembangan dimulai dari tingkat System, analisis, perancangan, implementasi (pemrograman), pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan (implementasi). Dengan demikian terdapat aktivitas-aktivitas sebagai berikut.

a) Analisis

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan elemen elemen di tingkat perangkat lunak, tahap ini juga biasanya disebut dengan *software requirement analysis*, dengan analisis ini dapat ditentukan domain-domain data atau informasi, fungsi, proses, atau prosedur yang diperlukan beserta unjuk kerjanya dan *interface*. Hasil akhir dari tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.

b) Perancangan (Desain)

Pada tahap perancangan kebutuhan atau spesifikasi perangkat lunak, yang dihasilkan pada tahap analisis ditransformasikan ke dalam bentuk arsitektur perangkat lunak yang memiliki karakteristik mudah dimengerti dan tidak sulit untuk mengimplementasikannya.

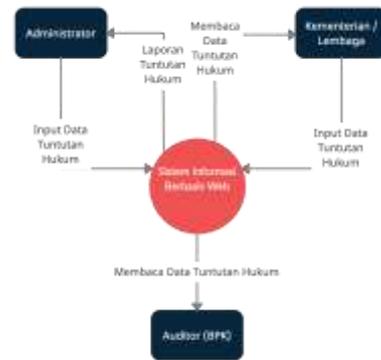
c) Pemrograman (*coding*)

Tahap ini sering disebut juga sebagai tahap implementasi perangkat lunak atau *coding*.

d) Pengujian (Testing)

Setelah perangkat lunak (komponen komponennya yang berupa kelas-kelas atau modul modul) selesai diimplementasikan, pengujian dapat segera dimulai.

Keluaran dari penelitian ini adalah sistem informasi berbasis web untuk penatausahaan tuntutan hukum kepada pemerintah pusat.

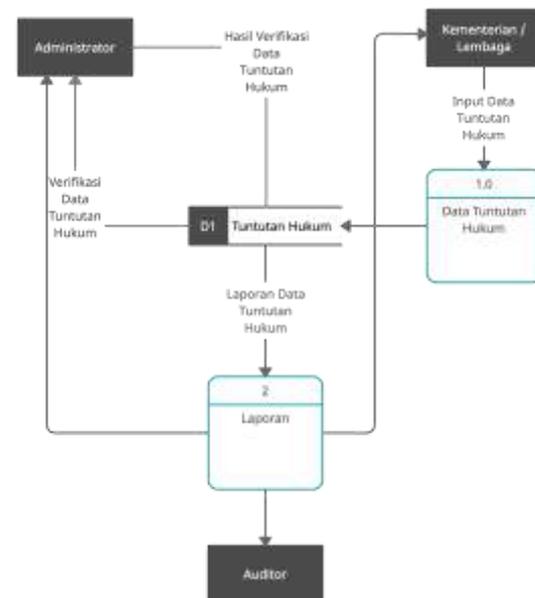


Gambar 1. Diagram Konteks Sistem Informasi

Berikut penjelasan diagram konteks di atas:

1. Kementerian / Lembaga, melakukan input data ke dalam sistem serta melakukan *update* jika diperlukan.
2. Administrator, melakukan verifikasi yang telah di-*input* oleh Kementerian / Lembaga.
3. Auditor, melakukan pengecekan terhadap data yang telah di-*input* apakah sudah sesuai atau belum.

2. Data Flow Diagram Level 1



Gambar 2. Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi Web

Administrator memegang peranan yang cukup penting dalam menjalankan sistem informasi

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Hasil Perancangan Sistem

Perancangan sistem dibedakan menjadi bagian yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang diterapkan pada metode perancangan yaitu:

1. Diagram Konteks

ini. Seorang administrator sebagai verifikasi data yang di-input oleh Kementerian / Lembaga. Berikut proses yang terjadi:

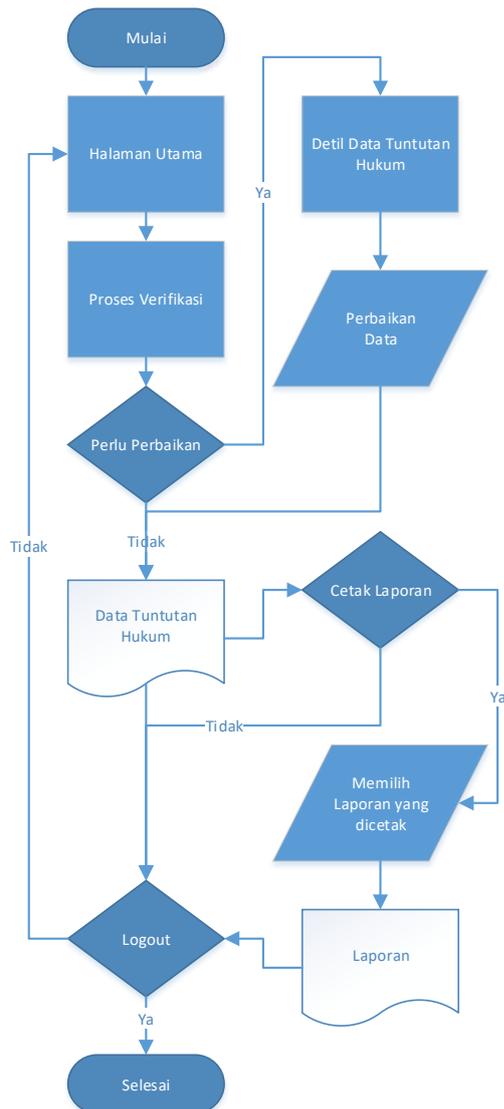
- a) Proses 1 (Data Tuntutan Hukum)

Kementerian / Lembaga melakukan *input* data tuntutan hukum, apabila data yang diisikan sudah lengkap maka data akan tersimpan ke dalam database. Setelah data tersimpan ke dalam database, administrator akan melakukan verifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Apabila belum sesuai, administrator akan melakukan perbaikan data tuntutan hukum tersebut sebelum dilakukan audit.
- b) Proses 2 (Laporan)

Setelah data sudah tersimpan ke *database*, dapat dilanjutkan proses pencetakan laporan data tuntutan hukum.

3. Flowchart

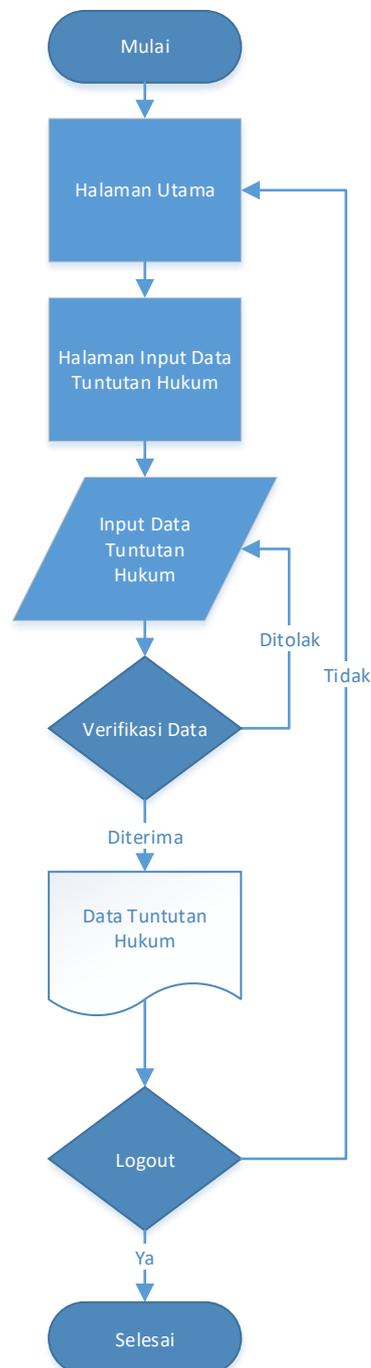
1) Flowchart Administrator



Gambar 3. Flowchart Administrator

Di halaman menu utama, administrator melakukan proses verifikasi data tuntutan hukum secara menyeluruh, apabila terdapat data yang perlu disesuaikan maka administrator akan masuk ke halaman detail data tuntutan hukum untuk melakukan perbaikan. Setelah data sudah sesuai, administrator dapat melakukan pencetakan laporan. Setelah laporan tercetak, administrator dapat melakukan pemilihan apakah mau *logout* atau tidak.

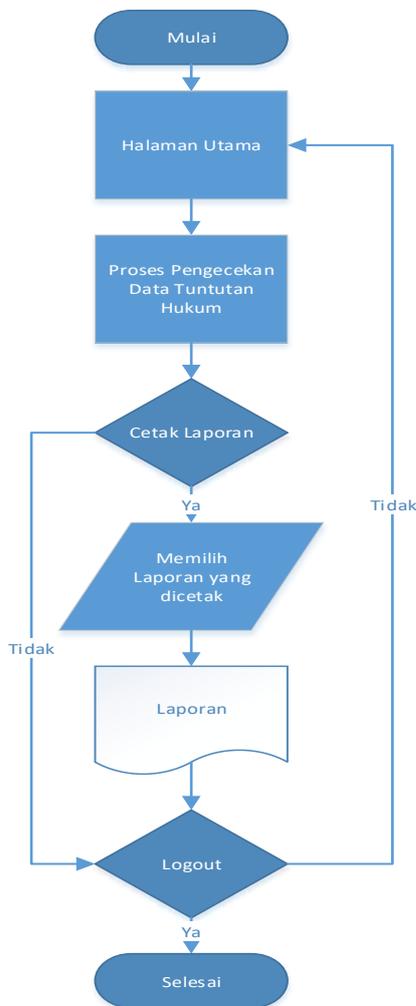
2) Flowchart Kementerian/Lembaga



Gambar 4. Flowchart Kementerian / Lembaga

Pada halaman menu utama, Kementerian / Lembaga melanjutkan ke menu untuk *input* data tuntutan hukum. Dilanjutkan dengan proses *input* data tuntutan hukum, kemudian akan terdapat verifikasi apakah data yang diinput oleh Kementerian / Lembaga sudah terisi semua atau belum. Apabila belum maka halaman yang tampil akan tetap pada halaman untuk meng-*input*. Apabila sudah terisi semua maka akan tersimpan ke *database*. Selanjutnya terdapat opsi apakah Kementerian / Lembaga akan logout atau tidak, jika tidak akan kembali ke halaman utama untuk melanjutkan *input* ke data tuntutan hukum lain.

3) Flowchart Auditor



Gambar 5. Flowchart Kementerian / Lembaga

Setelah berada pada halaman utama, dilanjutkan dengan proses pengecekan data tuntutan hukum oleh auditor. Setelah itu akan terdapat halaman untuk mencetak laporan, apabila ingin mencetak laporan maka akan muncul daftar laporan yang dapat dicetak dan berikut format laporan yang akan dicetak.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan perancangan yang telah dilakukan ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sistem informasi berbasis web ini dirancang sebagai solusi bagi DJPPR dalam melakukan penatausahaan tuntutan hukum kepada pemerintah pusat sehingga penatausahaan dapat dilakukan secara cepat dan tepat apabila dibandingkan penatausahaan yang dilakukan secara manual menggunakan excel.
2. Sistem informasi berbasis web dibuat bersifat intern, artinya program ini hanya kalangan tertentu yang memiliki hak akses terhadap sistem ini yaitu Administrator, masing-masing Kementerian/Lembaga, dan Auditor (BPK).

DAFTAR PUSTAKA

Ardian, Niko, 2008, Pengembangan Website FKIP Unsri sebagai Media Penyampaian Informasi, Tugas Akhir PDK Unsri : Tidak diterbitkan

Jauhari, Jaidan, 2008, Implementasi E Learning dalam pengembangan lingkungan belajar yang interaktif di Perguruan Tinggi, Laporan Penelitian Hibah Bersaing Dikti

Pressman, R.S. 2002. Rekayasa Perangkat Lunak, Yogyakarta : Andi Offset

Mahyuzir, T.D.1998. Rekayasa Perangkat Lunak, Yogyakarta : Andi Offset

Indrajit, R.E.2001. Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Elex Media Komputendo : Jakarta

Nugroho, Adi. 2002. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek. Bandung : Informatika